

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Qatar merupakan anggota organisasi Gulf Cooperation Council (GCC) yang sudah dua kali mengalami krisis diplomatik dengan sejumlah negara GCC. Krisis diplomatik pertama terjadi karena keberpihakan Qatar terhadap kubu yang berbeda dalam peristiwa Arab Spring. Seperti peristiwa demokratisasi Mesir, Qatar memihak kepada para demonstran dan Ikhwanul Muslimin (IM).<sup>1</sup> Keberpihakan Qatar terhadap kubu tersebut menimbulkan ketegangan dengan tiga negara GCC yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain karena IM diklasifikasikan sebagai kelompok terorisme.<sup>2</sup> Perbedaan dukungan ini kemudian berujung dengan terjadinya ketegangan hubungan diplomatik yang terjadi pada awal tahun 2014. Kemudian pada November 2014, ketegangan tersebut berhasil diatasi dan hubungan Qatar dengan beberapa negara GCC kembali normal.<sup>3</sup>

Arab Saudi, Bahrain, dan UEA merupakan mitra dagang Qatar di kawasan, maka normalnya hubungan Qatar dengan ketiga negara tersebut merupakan hal yang baik bagi Qatar, dimana ketiga negara ini berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan serta ekspor-impor Qatar.<sup>4</sup> Hal ini dapat dilihat melalui laporan World Integrated Trade Solutions, dimana pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah impor produk pangan Qatar dari UEA hingga mencapai angka

---

<sup>1</sup>Kristian Coates Ulrichsen, *Qatar and the Arab Spring: Policy Divers and Regional Implications*, (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2019), 4.

<sup>2</sup>F. Gregory Gause III, "What the Qatar crisis shows about the Middle East," dalam *The Qatar Crisis*, Project on Middle East Political Science, 2017, 10.

<sup>3</sup>Broto Wardoyo, "Rivalitas Saudi – Qatar dan Skenario Krisis Teluk," *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.7, No.1, 2014, 3-4.

<sup>4</sup>Jonathan Saul & Maha El Dahan, "Update 1-Qatar food imports hit after Arab nations cut tiestrade sources," Reuters, 9 Juni 2017, diakses pada Maret 2020 .[www.reuters.com/article/gulf-qatar-food-idUSL8N1J23IC](http://www.reuters.com/article/gulf-qatar-food-idUSL8N1J23IC).

USD 161 juta, dan impor dari Arab Saudi mencapai USD 149 juta. Kemudian tahun berikutnya, jumlah impor pangan dari UEA naik menjadi USD 181 juta, dan impor Arab Saudi senilai USD 141 juta. Sedangkan jumlah ekspor tahun 2015 dan 2016 menunjukkan bahwa UEA menjadi tujuan utama Qatar di kawasan Teluk yang selanjutnya disusul oleh Arab Saudi dan Bahrain.<sup>5</sup>

Normalnya hubungan antara Qatar dengan negara-negara GCC tersebut tidak bertahan lama. Untuk kedua kalinya Arab Saudi, Bahrain, dan UEA memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada Juli 2017 yang kemudian diikuti oleh Yordania dan Mesir. Berbeda dari krisis diplomatik sebelumnya dimana Qatar hanya mendapatkan sanksi berupa penarikan duta besar dari Doha. Pada krisis kali ini, ketiga negara GCC melakukan blokade perekonomian dan transportasi Qatar.<sup>6</sup>

Pemutusan hubungan diplomatik ini diprakarsai oleh Arab Saudi sebagai aktor dominan dalam GCC dengan dua alasan utama. Pertama, Qatar dinilai telah melanggar perjanjian dengan memberikan dukungannya terhadap kelompok yang dianggap sebagai terorisme. Kedua, kedekatan hubungan Qatar dengan Iran, dimana Arab Saudi sendiri tidak menginginkan kedekatan tersebut karena Iran merupakan musuh Arab Saudi serta dianggap sebagai sarang terorisme oleh GCC.<sup>7</sup>

Untuk mengakhiri krisis diplomatik ini, negara-negara GCC memberikan 13 tuntutan kepada Qatar. Salah satu isi dari tuntutan tersebut melarang Qatar

---

<sup>5</sup>“Qatar Food Product Exports by Country and Region 2016,” World Integrated Trade Solutions, 2016, diakses pada Maret 2020 <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/QAT/Year/2016/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/Total>.

<sup>6</sup>Micheal Jones, “What's going on with Qatar?,” dalam *The Qatar Crisis*, Project on Middle East Political Science, 2017, 6.

<sup>7</sup>Prasanta Kumar Pradhan, “Qatar Crisis and the Deepening Regional Faultlines,” *Strategic Analysis*, Vol.42, No.4, 2018, 1.

berhubungan dekat dengan Iran.<sup>8</sup> Namun, Qatar mengambil tindakan *counter* dalam merespon tuntutan tersebut bahwa tidak akan membungkuk dan merusak kedaulatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Emir Tamim bin Hamad dalam pidatonya selama 17 menit yang secara tegas menyampaikan penolakannya terhadap tuntutan dan tekanan yang diberikan tersebut.<sup>9</sup>

Satu bulan setelah ditolaknya 13 tuntutan tersebut, pemerintah Qatar mengambil keputusan yang berlawanan dengan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran pada Agustus 2017. Hal ini menandakan membaiknya hubungan Qatar-Iran, dimana sebelumnya Qatar dan negara-negara GCC memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran sejak Juni 2016. Pemutusan hubungan diplomatik ini dilakukan sebagai wujud solidaritas negara GCC terhadap Arab Saudi atas penyerangan kantor Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Arab Saudi yang dilakukan oleh pengunjuk rasa Iran.<sup>10</sup> Awal dari normalisasi ini ditandai dengan pengembalian duta besar Qatar ke Teheran.<sup>11</sup> Kemudian setelah itu Qatar terus meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Iran, seperti peningkatan kerjasama ekonomi dan militer.

Adapun sebelumnya hubungan Qatar dengan Iran tidak sebaik setelah normalisasi ini. Qatar cenderung menghindari untuk berpihak terhadap rivalitas antara Iran dan Arab Saudi serta tidak pernah menunjukkan dukungan atau keberpihakannya kepada Iran jika dihadapkan kepada permasalahannya dengan

---

<sup>8</sup>Gulf News, "What are the 13 demands given to Qatar?," 23 Juni 2017, diakses pada 15 Januari 2021, <https://gulfnews.com/world/gulf/qatar/what-are-the-13-demands-given-to-qatar-1.2048118>,

<sup>9</sup>Richard Falks, "The Gulf Crisis Reassessed," Foreign Policy Journal, 2018, diakses pada Maret 2020, <https://www.foreignpolicyjournal.com/2018/03/14/the-gulf-crisis-reassessed>.

<sup>10</sup> Faisal Mukhyat Abu Sulaib, "Understanding Qatar's Foreign Policy, 1995-2017," Middle East Policy, Vol. 14, No. 4, 2017, hal. 43.

<sup>11</sup>"Qatar Announces Return of Its Ambassador to Tehran," Ministry of Foreign Affairs Qatar, 8 Agustus 2017, diakses pada Maret 2020, [www.mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2017/08/23/qatar-announces-return-of-its-ambassador-to-tehran](http://www.mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2017/08/23/qatar-announces-return-of-its-ambassador-to-tehran).

GCC. Selain itu, dalam beberapa peristiwa Arab Spring, Qatar menyelaraskan diri dengan negara-negara GCC yang menyebabkan bentrok kepentingan dengan Iran, yang kemudian dituduh sebagai bentuk upaya anti-Iran. Bentrok kepentingan ini berdampak membahayakan hubungan Qatar dengan Iran pada saat itu.<sup>12</sup>

Keputusan Qatar menjalin kembali hubungan diplomatik dengan Iran membuat Arab Saudi berpikir bahwa Qatar hanya mengedepankan kepentingannya sendiri daripada keamanan negara-negara GCC dengan tidak mengambil tindakan serius melawan Iran.<sup>13</sup> Keputusan ini memberikan kecaman dan kemarahan dari negara-negara GCC, yang kemudian memperdalam tuduhan-tuduhan negatif terhadap Qatar, terutama mengenai dukungannya terhadap terorisme.<sup>14</sup> Selain itu, Qatar merupakan pihak yang paling merasakan dampak negatif baik secara politik, sosial dan ekonomi dari krisis diplomatik ini. International Trade Administration tahun 2017 mencatat bahwa terjadi peningkatan inflasi di Qatar selama beberapa bulan yang mencapai angka 0,4 persen. Hal ini disebabkan oleh pemberlakuan blokade ekonomi sehingga menyebabkan nilai impor Qatar turun sebanyak 40 persen.<sup>15</sup> Selain itu, persoalan pangan Qatar juga terhambat yang dikarenakan 80persen pangan Qatar diimpor dari negara-negara GCC dan hanya 1 persen berasal dari dalam negeri, sehingga mengakibatkan kebutuhan pangan menjadi berkurang. Rute penerbangan dari dan ke Qatar ditangguhkan, sehingga mengharuskan Qatar mengubah rute

---

<sup>12</sup>Mohammed Nuruzzaman, “Qatar and the Arab Spring: Down the Foreign Policy Slope,” *Contemporary Arab Affairs*, Vol.8, No.2, 2015, 8.

<sup>13</sup>Ariabarzan Mohammadi, “Saudi Arabia’s and Qatar Discourse and Practices in Mideterranean,” *MedReset Working Paper*, No.6, 2017, 8.

<sup>14</sup>Mehran Kamvara, *Iran – Qatar Relations*, (Doha: Center for International and Regional Studies, Qatar, 2017), hal. 167.

<sup>15</sup>“Qatar-Market Overview,” International Trade Administration, 2017, diakses pada Maret 2020, <https://www.export.gov/article?id=Qatar-Market-Overview>.

penerbangan ke Afrika dan Eropa dan menyebabkan terjadinya peningkatan biaya untuk setiap penerbangan.<sup>16</sup>

Sanksi yang diberlakukan tersebut seharusnya hanya berlangsung selama enam bulan. Namun sikap Qatar yang menghiraukan tuntutan yang diajukan dan diperburuk dengan normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran ini justru memperpanjang krisis diplomatik bahkan hingga tahun 2020. Pada 8 Juni silam, perwakilan Arab Saudi untuk PBB menyampaikan bahwa hubungan hanya akan normal kembali jika Qatar menyetujui tuntutan yang diberikan, yang di dalamnya termasuk mengurangi kedekatannya dengan Iran.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pemeliharaan hubungan dengan negara-negara Teluk sejatinya penting bagi Qatar yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan domestik. Namun Qatar tetap bersikukuh untuk mempertahankan hubungan diplomatik dengan Iran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa tindakan Qatar memilih untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran daripada memenuhi tuntutan negara-negara GCC untuk tidak berhubungan dekat dengan Iran, secara politis merupakan keputusan yang tidak biasa. Melalui normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran di tengah terjadinya krisis ini, Qatar menunjukkan perlawanannya terhadap Arab Saudi dan sekutu. Oleh karena itu, dapat diketahui adanya hal yang menarik di balik keputusan Qatar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran, yang kemudian memperpanjang krisis diplomatik dengan tiga negara GCC

---

<sup>16</sup>Coface Publication Embargo, *Embargo on Qatar: Menageable for the Time Being, but not Perennially*, (Bois-Colombes: Cofece Country Risk and Economic Studies Department, 2017), 2-3.

<sup>17</sup>“Ties with Qatar would normalize only if Doha meets Quartet’s demands,” Ajel.Sa English, 8 Juni 2020, diakses pada Maret 2020, <https://ajelen.com/ties-with-qatar-would-normalize-only-if-doha-meets-quartets-demands/>.

dan merupakan ketegangan terburuk yang pernah terjadi dalam hubungan perpolitikan Qatar dengan negara-negara GCC.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Di tengah terjadinya krisis diplomatik Qatar dengan sejumlah negara GCC yang belum normal, Qatar melakukan normalisasi hubungan dengan Iran yang sempat renggang pada tahun 2016. Hal ini merupakan sikap *counter* yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar terhadap tuntutan yang diajukan oleh Arab Saudi beserta aliansinya yang melarang perbaikan hubungan dengan Iran. Sikap Qatar yang enggan untuk menerima 13 tuntutan yang dikeluarkan oleh Arab Saudi beserta aliansinya dan diperparah dengan normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran ini membuat hubungan Qatar dengan sejumlah negara GCC menjadi lebih buruk dan memperdalam tuduhan-tuduhan negatif terhadap Qatar. Selain itu, dalam krisis diplomatik ini, Qatar merupakan pihak yang paling merasakan dampak negatif baik secara ekonomi, politik dan sosial.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan tersebut maka muncul pertanyaan yaitu mengapa Qatar memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran di tengah terjadinya krisis diplomatik dengan negara-negara GCC daripada patuh terhadap tuntutan yang diberikan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan alasan Qatar dalam menormalisasi hubungan dengan Iran di tengah krisis diplomatik dan kecaman dari negara-negara GCC.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Sebagai proses pembelajaran bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang baik dan benar.
2. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai kebijakan Qatar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam Ilmu Hubungan Internasional terkait dengan kebijakan luar negeri Qatar.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan acuan dalam proses analisis dan mencari jawaban, penelitian yang baik tentu bersandar kepada penelitian-penelitian sebelumnya dan literatur yang relevan untuk memperkuat argumentasi yang disampaikan.

Kajian pertama dilakukan oleh Mathias Sailer dalam “*Three Scenarios for the Qatar: Regime Change, Resolution or Cold War in the Gulf*”.<sup>18</sup> Sailer menjelaskan bahwa krisis diplomatik tahun 2017 yang berakar tuduhan dari sejumlah negara GCC mencerminkan pengingkaran Qatar terhadap janjinya yang tertuang pada perjanjian Riyadh Supplementary Agreement (RSA) tahun 2014, yang mewajibkan Qatar untuk mendekatkan kebijakan luar negerinya terhadap kepentingan Arab Saudi dan aliansinya.

Sailer menjelaskan bahwa terdapat tiga skenario bagi Qatar. Pertama, adanya keinginan pergantian rezim di Qatar, yang terlihat dari ambisi Arab Saudi dan sekutunya. Hal ini didapatkan melalui pernyataan pelobi Saudi dan surat kabar Emirat yang menyatakan bahwa anggota terkemuka Saudi dan Emirat Arab

---

<sup>18</sup>Matthias Sailer & Stephen Roll, *Three Scenarios for the Qatar: Regime Change, Resolution or Cold War in the Gulf*, (Stiftung Wissenschaft imd Politik, German Institute for International and Security Affairs: Berlin, 2017), 6-15.

menginginkan pergantian kepemimpinan di Qatar. Tetapi skenario ini tidak dapat dibayangkan tanpa adanya eskalasi militer dan kudeta istana yang didukung pihak luar. Eskalasi militer dalam bentuk invasi Saudi dan Emirat akan melibatkan risiko yang cukup besar karena konsekuensi regional yang tidak terduga. Baik Turki dan Iran telah menggarisbawahi dukungan mereka untuk Qatar. Kedua, resolusi konflik yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. AS dan UE mendesak agar konflik segera diselesaikan mengingat bahaya yang besar bahwa ketegangan akan melumpuhkan perjuangan melawan ISIS dan merugikan perekonomian melalui kenaikan harga minyak dan gas. Resolusi bersama dapat melibatkan pencabutan embargo sebagai imbalan atas pengusiran sejumlah individu dari Qatar yang dianggap oleh Arab Saudi, UEA, dan sekutunya sebagai teroris. Ketiga, perang dingin di Teluk. Krisis diplomatik ini membuat Qatar memperluas hubungan politik hingga militer dengan musuh Arab Saudi yaitu Turki dan Iran. Berdasarkan tiga skenario tersebut, Sailer memaparkan bahwa skenario ketiga adalah yang paling mungkin.<sup>19</sup>

Literatur pertama ini membantu peneliti dalam memahami skenario bagi Qatar dalam krisis diplomatik, dimana argumen utama yang dibangun bahwa perang dingin yang terjadi di Teluk yaitu antara kubu Saudi dengan Iran menyebabkan Qatar memperluas hubungannya dengan musuh Arab Saudi. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan. Literatur ini lebih berfokus kepada skenario bagi Qatar dalam krisis diplomatik namun tidak menjelaskan mengenai alasan Qatar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran,

---

<sup>19</sup>Matthias Sailer & Stephen Roll, *Three Scenarios for the Qatar: Regime Change, Resolution or Cold War in the Gulf*, (Stiftung Wissenschaft imd Politik, German Institute for International and Security Affairs: Berlin, 2017), 6-15.



sedangkan penelitian berfokus untuk mencari tahu alasan Qatar menormalisasi hubungan dengan Iran 2017 daripada patuh terhadap tuntutan yang diberikan.

Kajian kedua yang ditulis oleh Lucciano Zaccara dalam penelitiannya yang berjudul *“Iran and The Intra-GCC Crisis: Risks and Opportunities”*,<sup>20</sup> menjelaskan bahwa Iran merupakan faktor utama terhadap tuduhan Arab Saudi, UEA dan Bahrain kepada Qatar yang dapat mengancam stabilitas dan persatuan GCC, sehingga menyebabkan pemutusan hubungan dengan Qatar. Adapun hubungan Qatar dan Iran tidak dalam kondisi terbaik sebelum terjadinya krisis diplomatik tahun 2017 ini. Kemudian sejak awal terjadinya krisis, Iran dengan jelas menunjukkan dukungan yang kuat dan menyatakan kesediaannya untuk mengurangi dampak negatif dari blokade yang dilakukan oleh sejumlah negara GCC. Dukungan yang diberikan oleh Iran ini tidak terlepas dari upayanya untuk memperluas pengaruh di Qatar. Selain itu, sebagai negara yang dicap sebagai sarang terorisme, Iran melakukan beberapa inisiatif diplomatik yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan, terutama dengan negara-negara kecil seperti Qatar dan berusaha mendapatkan kepercayaan dalam kebijakan luar negerinya.

Literatur kedua ini membantu peneliti dalam menjelaskan kontribusi Iran terhadap krisis diplomatik Qatar. Dijelaskan bahwa melalui krisis diplomatik inilah kesempatan Iran untuk membalikkan fakta bahwa Arab Saudi merupakan ancaman nyata bagi stabilitas dan kedaulatan regional. Selain itu, krisis tersebut juga telah membantu Iran menjauh dari dikotomi sektarian tradisional sejak Iran memperkuat hubungannya dengan negara-negara Sunni seperti Qatar. Perbedaannya literatur ini dengan penelitian milik peneliti adalah peneliti

---

<sup>20</sup>Lucciano Zaccara, “Iran and The Intra-GCC Crisis: Risks and Opportunities,” IAI Papers, Vol.19, No.11, 2018, 2-17.

berfokus kepada kebijakan Qatar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran ketika terjadinya krisis diplomatik dengan GCC, sedangkan literatur ini menekankan kepada penjelasan Iran dan krisis diplomatik.

Kemudian penting untuk mengetahui bagaimana hubungan Qatar dengan Arab Saudi. Oleh karena itu, peneliti meninjau literatur yang ditulis Brato Wardoyo dengan judul “*Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk*”.<sup>21</sup> Bagian pertama dalam literatur ini menjelaskan bahwa awal permasalahan dari Arab Saudi-Qatar berasal dari tiga hal; ekonomi dan gas, perbatasan, permasalahan diplomatik regional. Kedua, menjelaskan skenario krisis Teluk dengan menggunakan tiga variabel yaitu jejaring lokal transnasional, kekuatan negara, dan jejaring sistemik. Wardoyo berargumentasi bahwa masalah utama dalam krisis Teluk ini terletak pada konteks sistemik. Hubungan antagonis Arab-Iran membuktikan dengan jelas pola *emity* dan *enmity* di Timur Tengah, salah satunya kedekatan hubungan Qatar dengan Iran yang mengakibatkan perseteruan antara Qatar dengan Arab Saudi. Kemudian di tingkat yang lebih luas, Saudi memiliki jejaring sistemik yang lebih kuat daripada Qatar. Arab Saudi sudah mulai membangun jejaring sistemiknya dalam waktu yang cukup lama baik di kawasan maupun global. Sedangkan jejaring sistemik Qatar terletak pada keberadaan Iran.

Literatur ini berkontribusi untuk membantu peneliti memahami perseteruan Arab Saudi dengan Qatar hingga krisis diplomatik saat ini. Argumen utama dari literatur ini menjelaskan krisis Teluk tidak terlepas dari konstelasi politik regional yang di dalamnya terdapat pola interaksi Arab Saudi dan Iran sebagai kekuatan utama di kawasan. Perbedaan literatur ini dengan penelitian milik peneliti bahwa

---

<sup>21</sup>Brato Wardoyo, “Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk,” Jurnal Hubungan Internasional, Vol.7, No. 1, 2018, 81-93.

literatur ini menggunakan cara pandang geopolitik, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme.

Mengingat Qatar merupakan negara kecil, maka terdapat kemungkinan ancaman militer dan keamanan di tengah situasi politik kawasan Teluk yang tidak stabil yang dapat berimbas pada kegiatan perekonomian Qatar. Untuk mengetahui bagaimana negara kecil seperti Qatar dapat *survive*, peneliti bersandar pada literatur yang ditulis oleh Rory Miller dan Harry Varhoeven dalam penelitiannya yang berjudul “*Overcoming smallness: Qatar, the United Arab Emirates and Strategic Realignment in the Gulf*”.<sup>22</sup> Miller dan Varhoeven menjelaskan mengenai bagaimana Qatar dan UEA sebagai *small states* menghadapi ancaman yang ditimbulkan dengan menjadi tetangga dari dua hegemoni regional, yaitu Arab Saudi dan Iran. Dalam artikel ini peneliti berfokus kepada strategi yang dilakukan Qatar karena relevansinya dengan penelitian ini. Miller dan Varhoeven memaparkan bahwa sejak dimulainya krisis diplomatik Teluk pada tahun 2017, Qatar muncul sebagai aktor yang lebih sensitif dalam merespon perubahan lingkungan eksternal daripada kekuatan regional yang terlibat dalam konflik tersebut.

Peningkatan hubungan Qatar dengan Iran untuk menyeimbangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Arab Saudi merupakan tanggapan Qatar sebagai *small state* dalam merespon kerentanan yang terjadi. Selain itu, keterlibatan pro-aktif Qatar dengan sejumlah aktor eksternal di Eropa, Afrika dan Asia menunjukkan bukti bahwa Qatar mampu mengubah asumsi konvensional tentang negara-negara kecil merupakan aktor yang lemah. Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini

---

<sup>22</sup>Rory Miller dan Harry Varhoeven, “Overcoming smallness: Qatar, the United Arab Emirates and strategic realignment in the Gulf,” *International Politics*, Vol. 57, 2020, 1-20.

bahwa literatur yang ditulis oleh Rory Miller dan Harry Varhoeven ini menekankan Qatar sebagai *small states* dalam menghadapi dua kekuatan hegemoni di kawasan, sedangkan penelitian ini menjelaskan identitas Qatar terhadap kedua negara hegemoni tersebut.

Selanjutnya, penjelasan mengenai hubungan Arab Saudi dan Iran telah menentukan dan mendorong kebijakan luar negeri yang lebih luas di negara-negara GCC termasuk Qatar. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Sanam Wakil dalam “*Iran and The GCC Hedging, Pragmatism and Opportunism*”.<sup>23</sup> Wakil berargumen bahwa secara tradisional Iran tidak menganggap Arab Saudi sebagai ancaman regional. Sejak revolusi, Iran telah berusaha mengantisipasi tantangan geostrategis utamanya yang berasal dari *power* yang lebih besar seperti AS dan Israel. Namun, dalam konteks politik regional sekarang, persepsi ini kemudian berubah sehingga meningkatnya tekanan Saudi, dimana Arab Saudi memandang Iran dengan dukungan dan campur tangannya terhadap aktor non-negara sebagai tantangan regional utama mereka. Setelah terjadinya Arab Spring yang kemudian diikuti oleh krisis diplomatik Teluk, hubungan Iran dan Arab Saudi berada di tingkat yang berbeda, Arab Saudi kemudian secara tidak langsung seolah menekan negara GCC yang kecil, seperti Qatar, untuk menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan Iran. Meskipun berada di bawah keamanan kolektif GCC, Qatar tidak mau menundukkan kedaulatannya terhadap upaya Saudi dalam menciptakan integrasi ekonomi yang lebih besar. Hal ini menciptakan perselisihan regional dan memberikan kesempatan bagi Iran untuk menindas dan membalas dendamnya kepada Arab Saudi.

---

<sup>23</sup>Sanam Wakil, “Iran and The GCC Hedging, Pragmatism and Opportunism,” Research Paper, Catham House, (London: The Royal Institute of International Relations: 2018), 2-17.

Literatur ini berkontribusi untuk menjelaskan dan memahami lebih lanjut mengenai bagaimana hubungan Iran dan Arab Saudi sehingga mendorong kebijakan luar negeri yang lebih luas di Teluk. Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini bahwa literatur yang ditulis oleh Sanam Wakil ini menjelaskan tindakan Qatar mendekati Iran menggunakan konsep *hedging*, selain itu juga dijelaskan bahwa hubungan kedua negara ini ditandai sebagai hubungan yang *opportunism*. *Opportunism* di sini dimaksudkan bahwa normalisasi hubungan Qatar dengan Iran bukan berarti Qatar sepenuhnya menggantungkan dirinya kepada Iran.. Qatar memanfaatkan posisi dirinya sebagai negara yang tidak mudah memprovokasi atau mengancam kekuatan lain semata-mata untuk melindungi diri.<sup>24</sup>

Kajian terakhir berhubungan dengan konsep yang akan peneliti gunakan dalam menjawab rumusan masalah, yaitu literatur yang membahas mengenai bagaimana identitas dalam hubungan internasional mempengaruhi tindakan suatu negara. Nurdiani Farthiraini dalam “*Politik Luar Negeri China Terhadap Zimbabwe*”<sup>25</sup> menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri China terhadap Zimbabwe di bawah kepemimpinan Hu Jintao, yang mana pada saat itu China melakukan pendekatan dengan Zimbabwe hingga membentuk aliansi. Tindakan yang dilakukan pemerintah China terhadap Zimbabwe ini kontras dengan negara barat, dimana negara-negara barat memberikan sanksi kepada Zimbabwe dikarenakan pemerintah Zimbabwe sendiri dinilai telah melakukan pelanggaran demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

---

<sup>24</sup>Vakil, 12-13.

<sup>25</sup>Nurdiani Farthiraini, “Politik Luar Negeri China Terhadap Zimbabwe”, *FACTUM*, Vol. 8, No.1, 2019, 141-151.

Untuk menganalisis permasalahan ini, Farthiraini menggunakan perspektif konstruktivis yang bertolak dari pemikiran Alexander Wendt. Lebih lanjut Farthiraini menjelaskan bahwa berdasarkan logika konstruksi sosial, tindakan pemerintah China tersebut merupakan konsekuensi logis yang dipengaruhi oleh faktor intersubjektif serta dibentuk dan didefinisikan berdasarkan identitas sosial pelaku. Dalam permasalahan ini, kekuatan historis juga mempengaruhi intersubjektif positif dan membentuk struktur *amity* China terhadap Zimbabwe. Sehingga dapat dipahami bagaimana China memandang Zimbabwe sebagai "teman". Selain itu, transformasi identitas China sebagai negara "*peaceful rise*" mendefinisikan pembentukan minat terhadap kerjasama ekonomi dan pembangunan yang diwujudkan melalui penguatan kerjasama dalam skema Kemitraan Strategis China-Zimbabwe. Oleh karena itu, literatur ini berkontribusi untuk memperdalam pemahaman peneliti terkait penggunaan konsep yang akan digunakan. Perbedaannya dengan penelitian milik peneliti terletak pada isu yang dibahas, dimana literatur ini menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri China, sedangkan penelitian ini menjelaskan kebijakan Qatar.

Berdasarkan beberapa literatur ilmiah yang dijadikan referensi di atas, peneliti menemukan relevansi antara kajian-kajian tersebut dengan topik penelitian yang kemudian dilakukan perbandingan dengan penelitian ini. Peneliti kemudian dapat melihat mengapa Qatar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran di tengah terjadinya krisis diplomatik dengan GCC.

## **1.6 Kerangka Konseptual**

Untuk menganalisis rumusan masalah, peneliti bersandar pada perspektif konstruktivisme. Pilihan perspektif ini tidak terlepas dari kontribusi pemikiran

konstruktivisme yang peneliti pandang dapat membantu memberikan pemahaman mengenai kebijakan luar negeri Qatar, khususnya terletak pada ide untuk melihat tindakan negara melalui pendekatan yang lebih sosial atau interpretivist. Karena untuk memahami interaksi negara juga membutuhkan berbagai jenis pemahaman interpretatif.

### 1.6.1 Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan cara pandang yang memusatkan perhatian pada kesadaran manusia dan peranannya dalam hubungan internasional.<sup>26</sup> Terdapat dua gagasan kunci konstruktivisme dalam studi hubungan internasional. Pertama, kekuatan material tidaklah sepenting *shared ideas* atau gagasan yang diyakini bersama. Kedua, *Shared ideas* ini kemudian menentukan identitas dan kepentingan.<sup>27</sup> Selain itu, konstruktivis berpendapat bahwa anarki dihasilkan melalui interaksi sosial dari aktor-aktor yang terlibat. Dengan kata lain, anarki bukan terbentuk secara alamiah melainkan terdapat proses subjektivitas dan sosial. Negara melihat anarki tergantung pada bagaimana negara tersebut melakukan subjektivitas pada negara lainnya. Oleh karena itu, anarki dapat memiliki banyak makna, dalam artian baik ataupun buruk.<sup>28</sup>

Alexander Wendt dalam bukunya yang berjudul “*Social Theory of International Politics*” menjelaskan bahwa, “asumsi utama dari teori sosial idealis yaitu bahwa perilaku negara terhadap aktor-aktor lainnya didasarkan atas

---

<sup>26</sup>John Ruggie, “What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the Social Constructivist Challenge,” *International Organization*, Vol. 52, No. 4, 856.

<sup>27</sup>Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 1.

<sup>28</sup>Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,” *International Organizations*, Vol. 26 No.2, 1992, 414.

*meanings* yang dimiliki objek tersebut terhadap mereka.”<sup>29</sup> Dalam memahami *meanings* dari perilaku negara tersebut, perlu ditempatkan pada konteks sosial intersubjektif (*Shared knowledge*). Hal ini berarti bahwa setiap perilaku negara, baik itu memutuskan hubungan, berperang, saling menjalin hubungan baik, maupun tidak melakukan hubungan dengan negara didasarkan atas adanya *meanings*. *Meanings* ini dapat terkonstruksi melalui kombinasi sejarah, norma, dan keyakinan.<sup>30</sup>

### 1.7.1.1 Identitas

Identitas merupakan konsep utama dari konstruktivis, dimana aktor mendefinisikan identitas dalam konteks “*self*” dan “*other*”. Wendt berpendapat bahwa identitas merupakan atribut yang menempel pada diri aktor yang kemudian memotivasi aktor tersebut dalam bertindak.<sup>31</sup> Bagaimana aktor memandang aktor lain akan menjadi faktor utama dalam tindakan aktor tersebut. Artinya, negara melihat negara lain berdasarkan identitas yang mereka cantumkan kepada negara tersebut, dan membentuk identitas sendiri.<sup>32</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa identitas membentuk kepentingan aktor, sehingga kemudian kepentingan ini melatarbelakangi tindakan aktor yang kemudian juga dapat membentuk identitas aktor tersebut.<sup>33</sup> Dengan demikian dapat diketahui bahwa perubahan identitas dapat saja terjadi melalui bagaimana “*the self*” memandang aktor lain. Pemaknaan mengenai siapa ‘aku/kami’ dan siapa ‘kamu/mereka’ dapat

<sup>29</sup>Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press: 1999), 140.

<sup>30</sup>Nurdiani Fathiraini, “Politik Luar Negeri China terhadap Zimbabwe,” *FACTUM*, Vol. 8, No.1, 2019, 143.

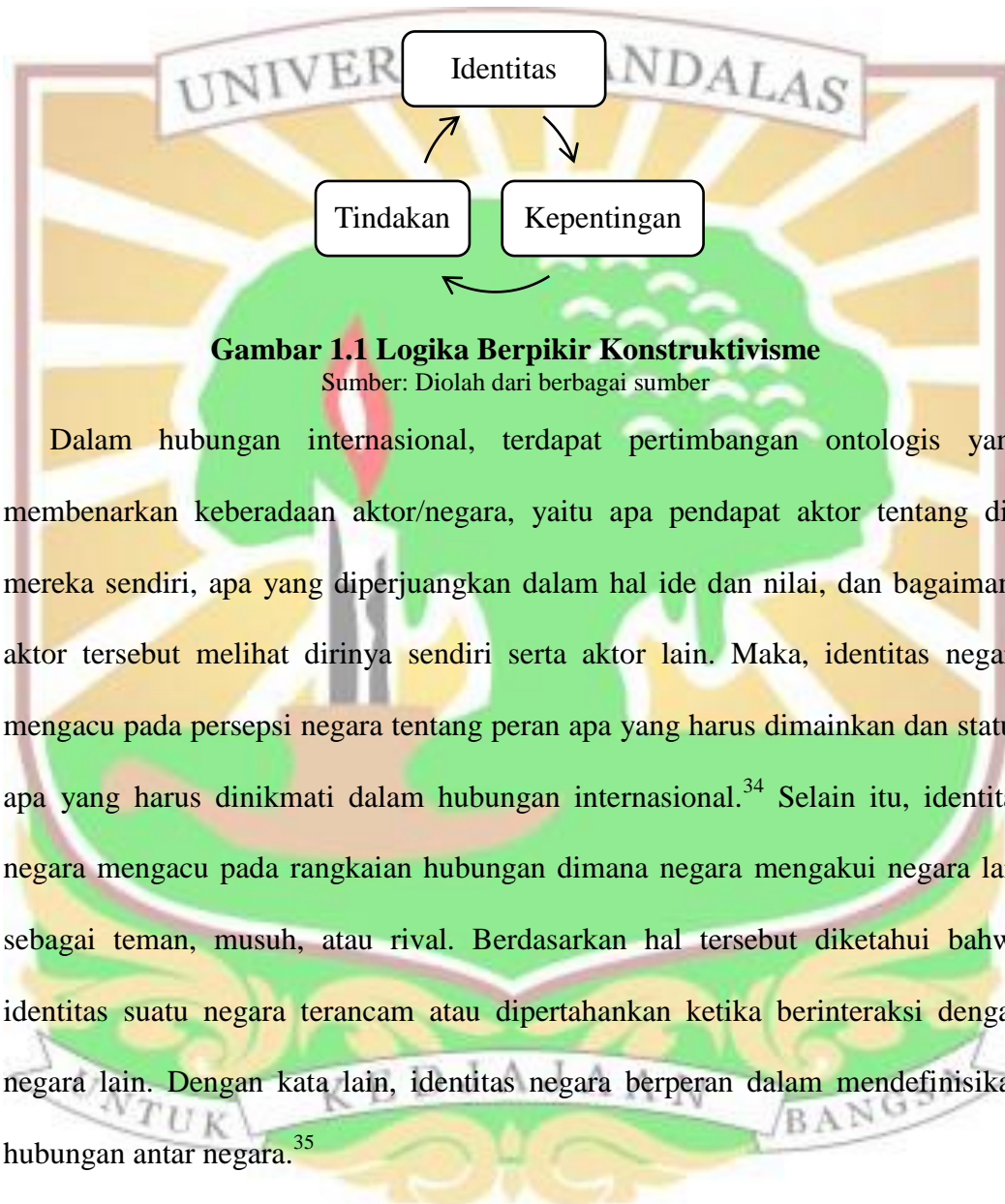
<sup>31</sup>Wendt, 244.

<sup>32</sup>Ted Hopf, “The Promise of Constructivism in International Relations Theory,” *International Security*, Vol. 23, No. 1, 1998, 175.

<sup>33</sup>Fitri Kamelia Margareth, “Identitas dalam Hubungan Internasional: Dilema dalam Kebijakan Luar Negeri Finlandia dalam Krisis Ukraina 2014,” *Journal of International Relations*, Vol.4, No.3, 2017, 3.



menentukan pemahaman mengenai apa yang diinginkan aktor, yang kemudian menentukan tindakan apa yang diambil oleh aktor tersebut. Oleh karena itu, identitas merupakan variabel independen yang mampu menjelaskan tindakan suatu negara.



Dalam hubungan internasional, terdapat pertimbangan ontologis yang membenarkan keberadaan aktor/negara, yaitu apa pendapat aktor tentang diri mereka sendiri, apa yang diperjuangkan dalam hal ide dan nilai, dan bagaimana aktor tersebut melihat dirinya sendiri serta aktor lain. Maka, identitas negara mengacu pada persepsi negara tentang peran apa yang harus dimainkan dan status apa yang harus dinikmati dalam hubungan internasional.<sup>34</sup> Selain itu, identitas negara mengacu pada rangkaian hubungan dimana negara mengakui negara lain sebagai teman, musuh, atau rival. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa identitas suatu negara terancam atau dipertahankan ketika berinteraksi dengan negara lain. Dengan kata lain, identitas negara berperan dalam mendefinisikan hubungan antar negara.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Masahiro Matsumura, "The Japanese State Identity as a Grand Strategic Imperative," Cnaps Working Paper Series, (Washington, D. C.: Brookings Institution Center for Northeast Asian Policy Studies, 2008), 3-4.

<sup>35</sup>Cameron G. Thies, "Sense and Sensibility in the Study of State Socialisation: A Reply to Kai Alderson," *Review of International Studies*, Vol. 29, No.4, 2003, 545.

Wendt membagi identitas dalam hubungan internasional menjadi empat bagian.<sup>36</sup> Pertama, identitas personal, yang terbentuk secara alamiah seperti lambang negara. Kedua, identitas tipe, yang dipengaruhi oleh hal tertentu seperti ideologi politik. Ketiga, identitas peran, yang terbentuk ketika aktor melakukan berhubungan dengan aktor lain kemudian mendapatkan tanggapan. Identitas ini Keempat, identitas kolektif, yang terbentuk ketika terdapat sekelompok atau sekumpulan negara yang saling berhubungan kemudian membentuk identitas yang dimiliki secara bersama.

### 1.7.1.2 Kepentingan

Konstruktivisme memandang bahwa kepentingan nasional suatu negara tidak bersifat *fixed*, melainkan terdapat konstruksi sosial yang terjadi sesuai dengan kondisi dalam masyarakat internasional. Artinya, hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh negara dengan negara lainnya membentuk kepentingan nasional negara tersebut. Selain itu, kepentingan terbentuk dan bertransformasi sesuai dengan struktur internasional, dikarenakan pembentukan struktur bukan hanya melalui dimensi material melainkan melalui *shared ideas* atau pembentukan gagasan bersama. Berdasarkan proses pembentukan inilah yang menjadikan konstruktivis percaya bahwa kepentingan bukanlah sesuatu yang *fixed* dan *given*, tetapi senantiasa berubah.<sup>37</sup>

Ketika identitas berbicara tentang “siapa dan apa aktor itu” maka kepentingan berbicara tentang “apa yang diinginkan aktor” dengan menunjukkan motivasi

---

<sup>36</sup>Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 224.

<sup>37</sup>Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, “Book Review: The National Interest in International Relations Theory,” *Indonesian Journal of International Studies*, Vol. 1, No.2, 2014, 188.

perilakunya.<sup>38</sup> Mengenai hubungan antara identitas dan kepentingan ini, Wendt mengatakan bahwa kepentingan mensyaratkan adanya identitas karena negara tidak mengetahui apa yang diinginkannya sampai negara tersebut mengetahui siapa dirinya. Ketiadaan kepentingan membuat identitas tidak memiliki kekuatan motivasi dan tidak dapat menjelaskan tindakan yang dihasilkan dari kombinasi *desire* dan *belief*.<sup>39</sup> Selain itu, mengenai *self-interest*, Wendt mengartikannya sebagai keyakinan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan aktor yang ditandai dengan sikap instrumental murni terhadap “*the other*”.<sup>40</sup> Oleh karena itu, untuk memahami *self-interest* harus memahami *the self* itu sendiri, khususnya mengenai hubungan “*the self*” dan “*the other*”.

Selanjutnya, ketika berbicara mengenai “*self*” dan “*other*” dalam sistem internasional tidak terlepas dari struktur peran dan posisi aktor lain apakah sebagai musuh, rival, dan teman. Hal ini kemudian dijelaskan oleh Wendt dalam “*Social Theory of International Politics*”.<sup>41</sup> Wendt memaparkan argumennya berdasarkan pandangan budaya anarki dari Hobbes, Lock, dan Kant. Pertama, budaya anarki Hobbes dan konstruksi *enmity*, dimana posisi subjeknya sebagai “musuh”. Budaya anarki ini menjelaskan bahwa sejatinya hubungan antar negara ditandai dengan hubungan *enmity* yang direpresentasikan oleh Wendt sebagai “*other*” yang tidak mengakui hak “*the self*” sebagai aktor otonom dan tidak akan dengan sukarela membatasi kekerasannya terhadap “*the self*”. Wendt berpendapat bahwa ketika semakin banyak anggota suatu sistem yang dianggap sebagai musuh, maka anggapan itu merepresentasikan sistem tersebut. Artinya, aktor lain

---

<sup>38</sup>Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 229.

<sup>39</sup>Wendt, 232.

<sup>40</sup>Wendt, 240.

<sup>41</sup>Wendt, 257-283.

mulai menganggap *enmity* bukan hanya mengarah pada aktor individu melainkan juga sebagai properti sistem, sehingga “*the other*” direpresentasikan sebagai musuh hanya karena mereka adalah bagian dari sistem, dalam hal ini “*the other*” menjadi “*generalized other*”.<sup>42</sup>

Kedua, budaya anarki Lock dan dominasi persaingan. Wendt menjelaskan bahwa struktur dan peran budaya anarki Lock merupakan orientasi rival, yang mana direpresentasikan juga sebagai “*other*” namun berbeda tipe dengan Hobbes, dimana budaya anarki Lock direpresentasikan kurang mengancam. Hal ini dikarenakan Lock menekan prinsip kedaulatan. Tidak seperti musuh, rival mengakui kedaulatan masing-masing dan tidak mencoba mendominasi atau menaklukkan aktor lain. Ketika kedaulatan “*the other*” diakui oleh “*the self*” dan sebaliknya, maka kedua pihak akan sama-sama menghargai prinsip tersebut.<sup>43</sup>

Ketiga, budaya anarki Kant, yang didasari pada “*emity*” dan posisi subjeknya sebagai “teman”. Dalam struktur peran ini, teman diharapkan untuk mengikuti dua aturan dasar, pertama aturan non-kekerasan yang berarti penyelesaian sengketa tanpa bantuan perang maupun ancaman perang, dan kedua saling membantu, yaitu mengambil tindakan kolektif dalam melawan ancaman dari luar.<sup>44</sup>

Selanjutnya, untuk memahami bagaimana aktor mempersepsikan aktor lain sehingga membentuk identitas “*self*” dan “*other*” atau sebagai teman, rival ataupun musuh, peneliti mengacu pada proses analisis dimensi identifikasi yang dijelaskan oleh Bernd Bucher dalam “*Revisiting ‘Identity’ in International*

---

<sup>42</sup>Wendt, 264.

<sup>43</sup>Wendt, 279.

<sup>44</sup>Wendt, 281.

*Relations: From Identity in Substance to Identifications in Action*".<sup>45</sup> Bucher memaparkan bahwa mempelajari tindakan identifikasi merupakan pusat untuk memahami konstruksi sosial yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, Bucher menjabarkan tiga dimensi analisis. Pertama, identifikasi yang mengekspresikan *self-understanding* atau pemahaman diri dari "*the self*" sendiri. Identifikasi ini tidak terlepas dari prinsip budaya, agama, politik, maupun ekonomi aktor. Kemudian peran hubungan temporal aktor juga ditekankan karena mengungkapkan narasi kontemporer "*the self*" yang dikaitkan dengan masa lalu dan masa depan yang berkesinambungan. Artinya, terdapat kesinambungan dengan bagaimana masa lalunya, seperti hubungan dengan aktor lain, dan apa yang terjadi ke depannya.<sup>46</sup>

Dimensi analisis kedua bertujuan untuk mengungkapkan "*the other*" mana yang mengambil posisi sentral dalam praktik identifikasi. Dengan demikian, dimensi analisis ini menempatkan narasi "*the self*" dalam mempersepsikan berbagai aktor. Persepsi ini berupa hubungan yang antagonis, kooperatif, sahabat, strategis, tradisional, atau sebagainya. Dimensi analisis ini akan menyelidiki cara identifikasi memetakan ke logika "aku-kita-mereka". Hal ini tidak terlepas dari mempertimbangkan bagaimana masing-masing aktor mengartikulasikan identitas negara dalam mengambil perspektif dari mereka yang dianggap sebagai "*the significant other*". Dimensi analisis ketiga, berhubungan dengan identifikasi dalam kebijakan tertentu yang dikeluarkan. Hal ini tidak terlepas dari opsi

---

<sup>45</sup>Bernd Bucher, "Revisiting 'Identity' in International Relations: From Identity in Substance to Identifications in Action," *European Journal of International Relations*, Vol. 23, No.2, 2016, 1-26.

<sup>46</sup>Bucher, 9.

kebijakan yang dipertimbangkan dan pembedaan yang mendasari keputusan yang diambil tersebut.<sup>47</sup>

Analisis identifikasi ini membantu analisis penulis dalam bagaimana Qatar mempersepsikan dirinya sebagai “*the self*” melalui *self-understanding* dengan melihat hubungannya dengan Iran dan sejumlah negara GCC sebelum dan ketika terjadinya krisis diplomatik tahun 2017. Kemudian dengan analisis identifikasi “*the other*” akan membuktikan siapa “*the other*” yang memiliki peran sentral dan membantu untuk memetakan ke logika “aku-kita-mereka”. Dimensi analisis ketiga akan menjelaskan bahwa Qatar dihadapkan dengan beberapa pilihan keputusan dalam menghadapi krisis, kemungkinan pilihan itu berupa patuh kepada Arab Saudi dan negara GCC, atau meningkatkan hubungan dengan Iran.



**Gambar 1.2 Bagan Alur Berpikir**

Sumber: Analisis peneliti

Berdasarkan pemaparan kerangka berpikir di atas, untuk menganalisis rumusan masalah, peneliti akan memulainya dengan melihat proses interaksi dan identifikasi Qatar dengan Iran dan Arab Saudi beserta aliansinya sebelum dan ketika terjadinya krisis diplomatik tahun 2017. Jawaban yang didapatkan kemudian mengacu kepada identitas Qatar sebagai “*the self*” dan Iran serta Arab

<sup>47</sup>Bucher, 10.

Saudi dan aliansinya sebagai “*the other*”, yang mana nantinya menunjukkan posisi negara-negara tersebut bagi Qatar apakah sebagai musuh, teman atau rival, yang kemudian menunjukkan adanya perubahan identitas Qatar terhadap negara-negara tersebut. Identitas yang dihasilkan tersebut menentukan kepentingan Qatar, yang kemudian melatarbelakangi tindakan Qatar. Hipotesis yang peneliti dapatkan bahwa terdapat perubahan identitas Qatar terhadap negara-negara GCC, dimana Qatar melihat negara-negara tersebut bukanlah sebagai teman sehingga kemudian Qatar lebih memilih Iran.

### **1.7 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk menganalisis data kualitatif diperoleh dari bahan tertulis pernyataan resmi, dokumen dan penelitian sebelumnya ataupun data sekunder lainnya. Menurut Zohraby, pendekatan kualitatif merupakan sebuah bentuk penelitian untuk memahami fenomena sosial dengan cara menafsirkan atau memaknainya melalui materi visual dan tekstual seperti wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.<sup>48</sup>

#### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan jenis eksplanatif dengan pertanyaan ‘mengapa’ untuk mencari korelasi antar dua variabel. Sedangkan tujuan dari penelitian eksplanatif adalah menerangkan dan menemukan hubungan sebab akibat antara dua variabel guna menelaah penyebab suatu fenomena yang terjadi.<sup>49</sup> Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mengetahui alasan Qatar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran di tengah terjadinya krisis diplomatik dengan negara GCC.

---

<sup>48</sup>Haradan Mohajan, “Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects,” *Journal of Economic Development, Environment, and People*, Vol. 7, No. 1, 2018, 1.

<sup>49</sup>Mohajan, 2.

### 1.7.2 Batasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Tahun 2011 merupakan awal terjadinya peristiwa Arab Spring yang membawa perubahan tatanan kawasan Timur Tengah secara masif, dimana pada saat itu Qatar mulai menunjukkan pengaruhnya di kawasan. Selanjutnya pada tahun 2014 merupakan awal dari terjadinya pembekuan hubungan diplomatik oleh negara GCC terhadap Qatar. Hubungan kembali membaik, namun pada tahun 2017, negara-negara GCC melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar dan pemerintah Qatar memutuskan untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Kemudian tahun 2018, Qatar terus meningkatkan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Namun, tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan data di luar batasan penelitian untuk memperkuat argumentasi penelitian ini. Setelah melalui proses penelitian, peneliti kemudian mendapati bahwa penelitian ini dibatasi sebelum terjadinya peristiwa Arab Spring.

### 1.7.3 Unit dan Level Analisis

Menurut Burhan, unit analisis ialah objek dan perilakunya yang hendak dianalisis sebagai akibat suatu fenomena itu dapat terjadi, dan unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi tindakan dari unit analisis.<sup>50</sup> Peneliti memilih Qatar sebagai unit analisis karena penelitian ini akan mencoba menjelaskan alasan Qatar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Sedangkan unit eksplanasi yang mempengaruhi tindakan Qatar adalah alasan terjadinya normalisasi hubungan diplomatik Qatar dengan Iran yang juga merupakan temuan dari penelitian ini. Kemudian level atau tingkat analisis

---

<sup>50</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Edisi ke-2 (Jakarta: Kencana, 2007), 68.



merupakan acuan dan posisi unit yang akan diteliti,<sup>51</sup> maka level atau tingkat analisis dari penelitian ini adalah kawasan, karena tindakan Qatar ini melibatkan beberapa negara di kawasan dan rivalitas antara Iran dengan Arab Saudi di kawasan Teluk Persia.

#### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan telaah dari literatur-literatur dengan mengategorisasikan bahan-bahan yang terkait dengan kebijakan luar negeri Qatar, krisis diplomatik, dan hubungan antara Qatar, Iran dan negara GCC yang melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar dengan dokumentasi yang diambil dari artikel jurnal, buku, media massa yang diakses melalui internet. Untuk mengakses informasi melalui internet, penulis menggunakan kata kunci seperti *Qatar – Iran Relations, Iran GCC relations, Saudi Iran rivalry, Qatar Saudi relations, GCC diplomatic crisis*, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperkuat argumentasi, penulis juga mengakses sumber dari situs-situs milik pemerintah seperti [www.mofa.gov.qa](http://www.mofa.gov.qa).

#### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini akan berfokus pada analisa alasan Qatar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran di tengah terjadinya krisis diplomatik dengan GCC. Dari data-data yang didapatkan, peneliti melakukan analisis melalui beberapa langkah. Pertama, peneliti akan melihat analisis identifikasi melalui dimensi identifikasi yang dijelaskan Bernd Bucher dan melihat bagaimana dinamika hubungan Qatar dengan Iran dan sejumlah negara GCC yaitu Arab

---

<sup>51</sup>Bungin, 69.

Saudi, UEA dan Bahrain sebelum dan ketika terjadinya krisis diplomatik tahun 2017. Kedua, jawaban yang didapatkan kemudian mengacu kepada identitas Qatar sebagai “*the self*” dan Iran serta Arab Saudi dan aliansinya sebagai “*the other*”, yang mana nantinya menunjukkan posisi negara-negara tersebut bagi Qatar apakah sebagai musuh, teman atau rival. Selanjutnya, analisis yang didapatkan membentuk identitas Qatar terhadap Iran dan Arab Saudi beserta aliansinya. Kemudian identitas yang dihasilkan tersebut menentukan kepentingan Qatar, yang kemudian melatarbelakangi tindakan Qatar.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Bab pertama ini menjelaskan kerangka dasar yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, konsep, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, batasan masalah, unit dan level analisis, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Dinamika Hubungan Qatar dengan Sejumlah Negara GCC dan Iran**

Bab kedua ini akan menjelaskan tentang bagaimana dinamika hubungan antara Qatar dengan Iran dan ketiga negara GCC yang melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar (Arab Saudi, UEA, dan Bahrain), yang akan dibagi menjadi dua sub-bab yaitu dinamika sebelum Arab Spring dan setelah Arab Spring. Arab Spring dijadikan patokan pembatas karena setelah terjadinya peristiwa Arab Spring Qatar mulai menunjukkan pengaruhnya di kawasan dan akar konflik dengan negara GCC mulai muncul kembali.

### **Bab III Normalisasi Hubungan Diplomatik Qatar dengan Iran pada saat Krisis Diplomatik tahun 2017**

Bab ini menjelaskan mengenai normalisasi hubungan diplomatik Qatar dengan Iran, yang diawali dengan pembahasan mengenai mengenai fenomena krisis diplomatik Gulf Cooperation Council (GCC) yang dialami Qatar, kemudian terdapat pembahasan tekanan yang diberikan kepada Qatar, dan normalisasi hubungan Qatar dengan Iran.

### **Bab IV Kebijakan Qatar Menormalisasi Hubungan Diplomatik dengan Iran pada Tahun 2017**

Bab ini akan membahas mengenai analisa penulis terkait alasan Qatar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran di tengah terjadinya krisis diplomatik dengan negara-negara GCC. Sehingga dalam bab ini akan berfokus kepada hasil analisis berdasarkan kerangka teoritis yang dipaparkan.

### **Bab V Kesimpulan**

Bab terakhir ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan beserta saran terhadap penelitian ini.

